

**PENGARUH KOMPETENSI, MORALITAS, DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD*
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA**

Restika¹⁾, Rahmawati²⁾, Salju³⁾

Universitas Muhammadiyah Palopo

Intisari : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi, moralitas, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. populasi dan sampel penelitian ini yaitu aparatur desa yang pada pemerintahan desa sekecamatan Bupon. Teknik pengumpulan sampel menggunakan teknik dengan menyebarkan kuisioner penelitian dengan metode skala likert. Analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program statistical packages for social science (SPSS). Hasil yang timbul dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*, variabel moralitas berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Kata kunci: Kompetensi, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Pencegahan *Fraud*

Abstract : This study aims to determine and analyze the effect of competence, morality, and internal control systems on fraud prevention in managing village funds. The population and sample of this research are village officials who are in the village government in the Bupon sub-district. The sample collection technique used a technique by distributing research questionnaires with the Likert scale method. The data analysis of this study used multiple linear regression analysis using statistical packages for social science (SPSS) programs. The results arising from this study indicate that the competence variable has a significant positive effect on fraud prevention, the morality variable has a significant positive effect on fraud prevention, while the internal control system has a negative and insignificant effect on fraud prevention.

Keywords: Competence, Morality, Internal Control System, Fraud Preventio

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa merupakan daerah teritorial terkecil dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki keistimewaan yakni desa memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan keunikan, adat budaya serta kebiasaan yang berlaku di desa tersebut. Dalam upaya memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang adanya dana Desa. Dana desa diartikan sebagai anggaran dana yang dikucurkan oleh pemerintah kepada desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016. Setiap desa harus dapat mengelola dana desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penemuan *Indonesian Corruption Watch*, sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 sudah tercatat 181 kasus dana desa dengan kerugian negara sebesar Rp 40,6 miliar. Terdapat 17 kasus pada tahun 2015, meningkat pada tahun 2016 menjadi 47 kasus di tahun 2017 meningkat lagi lagi menjadi 96 kasus dan pada tahun 2018 terdapat 27 kasus di desa yang semuanya menjadikan anggarandes sebagai objek korupsi (www.antikorupsi.org). Dalam penyaluran dana desa yang nominalnya cukup besar untuk setiap desa dibutuhkan kompetensi dan pengawasan yang ketat oleh pemerintah masing-masing desa dalam penyelenggaraannya. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) yang selama ini ditakuti oleh pemerintah dan masyarakat (Widayarta dkk, 2017).

Dalam rangka melaksanakan program pembangunan desa-desa di seluruh Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

pedesaan, setiap tahun pemerintah mengeluarkan dana yang besar untuk didistribusikan ke desa-desa di seluruh Indonesia. Hingga tahun ini pemerintah sudah mengucurkan dana desa sebanyak Rp 400,1 triliun dimulai dari tahun 2015-2021, anggaran dana desa terus meningkat. Setiap tahun mulai Rp. 20,8 triliun pada tahun 2015, Rp. 47 triliun pada tahun 2016, Rp. 60 triliun pada tahun 2017 dan 2018, Rp. 70 triliun pada tahun 2019, Rp. 72 triliun pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 anggaran dana desa mencapai Rp. 28,82 triliun yang telah di cairkan (Kementerian Keuangan, 2021).

Dengan meningkatkan kualitas pengendalian intern dan mengoptimalkan sistem pengendalian intern yang baik, juga dapat mencegah terjadinya penyelewengan pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal (SPI) sebagai sarana untuk mengelola, memantau, dan mengukur sumber daya organisasi memainkan peran kunci dalam pencegahan dan deteksi penipuan (Pratama, 2017).

Penelitian dilakukan di salah satu desa di Kecamatan Bupon yang alokasi dana desanya begitu banyak, sehingga sangat mungkin terjadi kecurangan dana desa mengingat masih banyak aparat desa yang tidak mampu mengelola keuangan desa. Untuk menghindari kecurangan, semua kepala desa dibantu dan semua aparat pemerintah desa dilatih untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan desa dengan baik (jatengprov.go.id).

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi, Moralitas, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Budaya Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Pemerintahan Desa Sekecamatan Bupon, Kabupaten Luwu)”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory Fraud Triangle

Teori ini dicetuskan oleh *Donald R. Cressey* pada tahun 1953. *Cressey* melakukan penelitian ekstensif dengan para pelaku kejahatan yang terbukti bersalah untuk menentukan apa yang memotivasi orang tampaknya jujur untuk melakukan penipuan. Temuan *Cressey* ini akhirnya diringkas dengan sebutan *fraudtriangle*. Tiga komponen dari *fraud triangle* adalah tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Ketiga komponen yang dicetuskan oleh *Cressey* dalam Priantara (2013) sebagai berikut:

a. Sisi pertama adalah tekanan (*pressure*)

Tekanan adalah dorongan untuk melakukan kecurangan. Tekanan biasanya muncul dari kebutuhan dan masalah keuangan, tetapi banyak pelaku hanya didorong oleh keserakahan.

b. Sisi kedua adalah peluang atau *opportunity*

Peluang adalah peluang yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Pada dasarnya ada dua faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan atau peluang seseorang untuk melakukan penipuan.

- 1) Sistem pengendalian internal yang lemah (misalnya B. Jejak audit yang hilang atau kurang karena aktivitas manajemen yang tidak dapat dilacak, tidak memadai dan tidak efisien di area risiko dan proses bisnis, sistem dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang dikompensasi Kompleksitas organisasi, kebijakan dan prosedur SDM yang tidak menguntungkan bukan.
- 2) Kepemimpinan organisasi yang buruk dapat meningkatkan peluang terjadinya kecurangan. Sepertinya tidak ada komitmen yang tinggi dan contoh yang baik dari level manajemen, dan sikap manajemen yang ceroboh.

c. Sisi ketiga adalah rasionalisasi

Rasionalisasi terjadi karena seseorang mencari pembenaran untuk berbuat curang. Penipu percaya atau merasa bahwa tindakan mereka adalah hak mereka, bukan penipuan. Penjahat bahkan bisa merasa kuat karena mereka telah melakukan banyak hal untuk organisasi.

Pencegahan *Fraud*

Pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kasus *fraud*, yaitu dengan cara memperkecil peluang/kesempatan dan mempersulit langkah pelaku untuk melakukan tindakan *fraud*, menurunkan tekanan pegawai/karyawan supaya mampu dalam memenuhi kebutuhannya sendiri/tidak selalu merasa kekurangan atas pencapaiannya, serta mengeliminasi alasan untuk merekayasa alasan dan melakukan pembelaan diri atas tindakan menyimpang yang sudah dilakukan tersebut (Hariawan dkk,2020).

Upaya pencegahan *fraud* ini dapat dicapai dengan memantau dan menilai kepemimpinan. Oleh karena itu, Anda dapat memprediksi terjadinya *fraud* dengan memantau dan mengevaluasi aktivitas yang telah atau belum dilakukan. Melibatkan aparat desa dalam pencegahan kecurangan dapat sangat membantu dalam mengurangi atau mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan. Selain itu, regulasi pencegahan *fraud* dapat mengurangi *fraud*. Aturan pencegahan penipuan sebagai tindakan pencegahan standar mencakup berbagai langkah yang harus diberitahukan kepada karyawan untuk memastikan implementasi yang tepat. Aturan tersebut juga memberikan sanksi bagi pegawai yang berani melakukan kecurangan.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Pemendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah sekumpulan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur desa khususnya aparatur desa yang terkait atas pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa, yang mengharuskan bekerja dengan sepenuh keahliannya dalam mengelola keuangan desa dengan baik dan benar sesuai harapan pemerintah desa dan masyarakat desa. Kegiatan-kegiatan pengelolaan keuangan desa meliputi:

a. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dan mengacu

pada rencana pembangunan kabupaten/kota. Mengembangkan rencana pembangunan desa untuk memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan APBDesa yang telah ditetapkan sebelumnya, terdapat transaksi pendapatan dan belanja desa. Dalam lingkup penegakan kekuasaan desa, semua penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa.

c. Penatausahaan

Kepala desa harus menetapkan bendahar desa untuk melakukan pengelolaan keuangan. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran.

d. Pelaporan

Menurut permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan hak dan kewajiban, kepala desa wajib :

- 1) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/Walikota
- 2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
- 3) Pemerintah desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
- 4) Pemerintah desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD.

e. Pertanggungjawaban

Permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisas pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

f. Pembinaan dan Pengawasan

- 1) Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana

desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa.

- 2) Pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan memantau jalannya pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- g. Tahap-tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa :

- 1) Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran desa.
- 2) Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja dan pembiaayaan.
- 3) Timbulnya sejumlah transaksi dalam pelaksanaan anggaran.
- 4) Berdasarkan transaksi kemudian akan menghasilkan sebuah neraca.

Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban lainnya yaitu dalam bentuk laporan realisasi anggaran desa (Sujawwerni, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ialah suatu metode penelitian ilmiah yang sistematis yang menggunakan model matematis, teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena, baik pada bagan-bagan maupun pada hubungannya.

Menurut Sugiyono (2016: 80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteritik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.

Penelitian ini populasi yang digunakan yaitu Aparatur Desa sekecamatan BUPON:

- | | |
|------------------------|------------|
| a. Desa Balutan | : 10 Orang |
| b. Desa Buntu Batu | : 9 Orang |
| c. Desa Malenggang | : 9 Orang |
| d. Kelurahan Noling | : 11 orang |
| e. Desa Padang Kamburi | : 9 Orang |
| f. Desa Padang Ma'bud | : 10 Orang |
| g. Desa Padang Tuju | : 10 Orang |
| h. Desa Saluinduk | : 11 Orang |

- i. Desa Tampumia : 11 Orang
 j. Desa Tanjung : 10 Orang
 Total : 100 Orang

Menurut sugiyono (2016: 81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar maka meneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan, dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih sebagai anggota sampel. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N.d^2+1}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

d² = Presisi (Ditetapkan 15% dengan tingkat kepercayaan 90%)

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{100}{100.(0,15)^2+1} = 30,76$$

Dibulatkan menjadi 30

Dengan rumus tersebut, maka diperoleh jumlah sampel yaitu :

Tabel 3.1

Perhitungan Jumlah Sampel

No	Desa sekecamatan Bupon	Sampel	
1.	Desa Balutan	=10/100*30	3
2.	Desa Buntu Batu	=9/100*30	2
3.	Desa Malenggang	=9/100*30	2

4.	Kelurahan Noling	=11/100*30	4
5.	Desa Padang Kamburi	=9/100*30	2
6.	Desa Padang Ma'bud	=10/100*30	3
7.	Desa Padang Tuju	=10/100*30	3
8.	Desa Saluinduk	=11/100*30	4
9.	Desa Tampumia	=11/100*30	4
10.	Desa Tanjung	=10/100*30	3
Total			30

Berdasarkan perhitungan sampel pada tabel di atas maka dapat dilihat jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 30 Orang.

HASIL PENELITIAN

Analisis Linear Berganda

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Kompetensi (X₁), Moralitas (X₂), dan Sistem Pengendalian Internal (X₃) terhadap Pencegahan *Fraud*(Y) digunakan metode regresi linear berganda. Semua variabel bebas dimasukkan dalam persamaan regresi linear berganda yaitu Kompetensi (X₁), Moralitas (X₂), dan Sistem Pengendalian Internal (X₃). Hal ini ditunjukkan untuk mengetahui persamaan-persamaan regresi linear berganda. Bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).

Tabel 4.9 1

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
			Beta		

Constant)	1.979	2.855		.693	.493
	.398	.086	.576	4.625	.000
	.541	.121	.479	4.483	.000
	-.076	.064	-.131	1.182	.245

Dependent Variable: Pengendalian Internal (Y)

b. Lampiran 4

Berdasarkan tabel 4.9 diatas maka hasil persamaan regresi linear berganda yang didapatkan dapat dilihat sebagai berikut :

$$Y = 1,979 + 0,398 + 0,541 + (-0,076)$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi berganda tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai konstanta (a) sebesar 1.979 artinya semua variabel independen sama dengan nol maka kinerja aparatur sebesar 1,979 satuan.
2. Nilai koefisien Kompetensi (b1) sebesar 0,398. Artinya setiap ada kenaikan variabel kompetensi (X_1) sebesar satu satuan maka aparatur akan meningkat sebesar 0,398 satuan.
3. Nilai koefisien Moralitas (b2) sebesar 0,541. Artinya setiap ada kenaikan variabel moralitas (X_2) sebesar satu satuan maka kinerja aparatur akan meningkat sebesar 0,541 satuan.
4. Nilai koefisien Sistem Pengendalian Internal (b3) sebesar -0,076. Artinya setiap ada kenaikan variabel sistem pengendalian internal (X_3) sebesar satu satuan maka kinerja aparatur akan menurun sebesar -0,076 satuan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinan adalah kuadrat dari koefisien korelasi (R) atau disebut juga R-Square. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kompetensi, Moralitas, dan Sistem Pengendalian Internal. Dengan menggunakan SPSS, diperoleh koefisien determinan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.10

Hasil Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	.874 ^a	.764	.743	.97048
a. Predictors: (Constant), x3, x2, x1				
b. Lampiran 5				

Hasil tabel 4.10 menunjukkan bahwa R Square sebesar 0,764 yang artinya bahwa variabel independen (kompetensi, moralitas, dan sistem pengendalian internal) memberikan pengaruh besar 76,4% terhadap variabel dependen (pencegahan *fraud*), dilihat dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji t

Uji t digunakan untuk signifikan atau tidaknya suatu pengaruh variabel secara parsial atau variabel dependen. Untuk menguji hipotesis maka terlebih dahulu menentukan kriteria yaitu apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat signifikan $< 0,05$ maka hipotesis yang diajukan akan ditolak.

Kemudian dibandingkan dengan hasil signifikan yang telah diolah menggunakan program SPSS output uji t pada tabel berikut :

Tabel 4.11

Hasil Uji t					
Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	1.979	2.855		.693	.493
	.398	.086	.576	4.625	.000
	.541	.121	.479	4.483	.000
	-.076	.064	-.131	1.182	.245

Dependent Variable: Pengendalian Internal (Y)

Sumber: Lampiran 5, Hasil Olah Data 2022

Berdasarkan nilai uji t yang diperoleh secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi diperoleh t_{hitung} sebesar $4,625 > 1,703$ dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*.
2. Moralitas diperoleh t_{hitung} sebesar $4,483 > 1,703$ dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*.
3. Sistem pengendalian internal diperoleh $t_{hitung} = -1,182 < 1,703$ dengan tingkat signifikan $0,245 > 0,05$ berarti sistem pengendalian internal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen secara bersama-sama dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis akan menggunakan tingkat signifikan sebesar $5\% = 0,05$. Hasil penelitian dengan menggunakan program SPSS V.22 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.12

Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	103.478	3	34.493	6.623	.000 ^b
Residual	32.022	34	.942		
Total	135.500	37			
a. Dependent Variable: Y					
b. Predictors: (Constant), x3, x2, x1					
c. Lampiran 5					

Sumber: Lampiran 5, Hasil olah 2022

Berdasarkan Tabel 4.12 diketahui bahwa nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan nilai hitung $36,623 > F$ tabel 2,96. Dengan demikian bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini secara simulat berpengaruh terhadap variabel dependen.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian data dan analisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kompetensi aparatur desa memiliki tingkat signifikan diatas 1,703 yaitu sebesar 4,625. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan (Studi kasus pada desa sekecamatan Bupon).
2. Moralitas memiliki tingkat signifikan diatas 1,703 yaitu sebesar 4,483. Hal tersebut menunjukkan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa (Studi kasus pada desa sekecamatan Bupon).
3. Sistem pengendalian internal memiliki tingkat signifikan dibawah 1,703 yaitu -1,182. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa (Studi kasus pada desa sekecamatan Bupon).

Saran

1. Bagi aparatur desa di Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu diharapkan dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi kompetensi yaitu dengan meningkatkan keinginan belajar dan menambah pengetahuan tentang penyusunan laporan keuangan desa dan teknik pengelolaan keuangan desa agar mengikuti peraturan terbaru dan pedoman yang berlaku.
2. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi penelitian selanjutnya yang memiliki topik dan tema yang sama.
3. Pengumpulan data pada penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya sebatas penyebaran kuesioner saja tapi dapat juga dilakukan dengan pengamatan, dokumentasi, observasi serta wawancara langsung ke objek penelitian. Kehadiran peneliti pada saat responden melakukan pengisian kuesioner sebaiknya dilakukan, karena responden dapat menanyakan langsung pernyataan yang kurang atau tidak dipahami.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifiyanto, Dwi Febri., dan Kurrohman, Taufik. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol.2, No.3, hal.481-493.
- Ariastuti, N. M., Andayani W, R. D., & Yuliantari, N. P. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada LPD Se-Kecamatan Denpasar Utara. *Hita Akuntansi dan Keuangan* , 802.
- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal Dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9.
- Aulia, Putri. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota. *Jurnal JOM FEB*, Volume 1.
- Dwijayani, S., Sebrina, N. & Halmawati. (2019). *Analisis Fraud Triangle untuk Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada*
- Eka Putra, I. P. A. P., & Latrini, M. Y. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Moralitas pada Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) di LPD se-Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(3), 2155–2184.
- Fatmawati1). (2021). PENERAPAN PENGANGGARAN PARTISIPATIF: EFEK PEMBELAJARAN TEORI . *Prosiding 5th Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, 2021* , 194-199.
- Furqani, Astri. 2010. “Pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan good governance (studi pada pemerintahan Desa Kalimo’ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep).” *UPN Jawa Timur*.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Gustiawan. 2013. “Pengolahan data kependudukan: Menghasilkan laporan data penduduk, masuk, meninggal, lahir, pindah dan laporan umur.” 2013.
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1),1–13.
- Jatengprov.go.id. (2020). Berita Daerah Dana Desa Harus Digunakan Sesuai Aturan. Dipetik Januari 20, 2020, dari <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/dana-desa-harus-digunakan-sesuaiaturan>.
- Jihan Fathia, M. I. (2022). Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance, 2022, IV*, 457-458.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. CV. Andi. Yogyakarta.
- Karimah, Faizatul. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten

- Lamongan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 2. No. 4. Hal.597-602
- Kementrian Keuangan. (2020). Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2020.
- Laksmi, dan Sujana. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 26 (3): 2155- 2182
- MADA1, S. (n.d.). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi. 107-113.
- Natasya, T. N., Karamoy, H., & Lambey, R. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Resiko Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. Iv Polda Sulut. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 847–856.
- Oktavia, R. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas,. *Skripsi*, 2021, 1-9.
- Udayani, dan Sari. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 18 (3): 1774-1799.
- Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2017*). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1) Seri D, 445-458
- PUSPITANINGRUM, M. T. (2019). PENGARUH *FRAUD TRIANGLE* sebagai PREDIKTOR Kecurangan. *JURNAL BISNIS DAN AKUNTANSI*, 2019, XXI, 80-81.
- Pratama, A (2017). "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Moderasi Sistem Pengendalian Pemerintah". Skripsi.
- Priantara, D. 2013. *Fraud Auditing and Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Ramadhan, F. (2016). *SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA DESA*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2016, IXX, 324-340.
- Ratri, S.W.S. 2018. Pendeteksian Kecurangan pada Pelaporan Keuangan dengan Analisis *Fraud Triangle* (Studi dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *e-Proceeding of Management Telkom University: Vol. 5*, Hlm. 3330-3341
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Smith, W. Robert and Mark Bertozzi. 1998. Principals and Agents : An explanatory model of public budgeting. *Journal of Public Budgeting and Financial Management (Fall)*: 325-353
- Subroto, 2008. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung. *Tesis : Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegor*
- Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo

- Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Tesis Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta 2012.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press Yusuf, Burhanudin. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Suparno, E. (2012). Kebijakan dan strategi penempatan tenaga kerja. Dipetik Maret 20, 2021 dari <http://www.setkab.go.id/index.php?pg=detailartikel-3518>
- SYAM, T. W. (2021). TRANSPARANSI DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN WABAH. *Skripsi, 2021*, 1-64.
- Utama1, I. G. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DALAM PERSPEKTIF FRAUD. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 7.1 (2018)*, 252-259.
- Widiyarta, K., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2)*, 1–12.
- Widjijanto, H dan Nahartyo., 2008, Penganggaran Partisipatif: Efek Pembelajaran Teori Keagenan dan Penatalayanan terhadap Kinerja Manajer, dengan Sikap dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemediasi, September: 1-33, Yogyakarta.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD). *E-Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume 02, No 02*.
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan *Fraud* Pada Pemerintahan Desa. *Jurnal Akuntansi Mutliparadigma, 9(2)*, 331–345.
- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. . (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan *Fraud* Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset, 1(2)*, 63–89.
- Wulandari, N. (2021). PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, KOMITMEN . *SKRIPSI, 2021*, 13-35.
<http://www.antikorupsi.org/>
- Yunita, Eka Nur dan Sabaruddinsah, 2011. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja *Manajerial*. *JRAK Vol.2 No.01 Tahun 2011*